SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: p-ISSN 2615-3009
Economic, Accounting, Management and Business e-ISSN 2621-3389
Vol. 8, No. 3, July 2025

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Antonia Jesica Dadi Ghale[1], Godeliva Mega Putri Tuto Elaman[2], Evangeli Cindy Bana[3], Gratia Kontar Iri[4], Maria Jenifer Da Costa Jemahan[5], Theresa Apriani Teti[6], Emiliana Martuti Lawalu[7]

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Jesikaghale3@gmail.com[1], meegaelaman@gmail.com[2] , banaevangeliemail@gmail.com[3], gratiaki4@gmail.com[4], jnniedcsta@gmail.com[5], ,teresateti.10@gmail.com[6], lawalu80@gmail.com[7]

Submitted: 06th April 2025 | **Edited**: 14th June 2025 | **Issued**: 01st July 2025

Cited on: Ghale, A. J. D., Elaman, G. M. P. T., Bana, E. C., Iri, G. K., Jemahan, M. J. D. C., Teti, T. A., & Lawalu, E. M. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8*(3), 778-784.

ABSTRACT

Poverty remains a persistent and complex problem in Kupang City, East Nusa Tenggara, characterized by low income levels, high unemployment rates, and limited access to education. This study aims to examine the impact of educational attainment on poverty levels among low-income communities in Kupang. Utilizing a qualitative research approach, data were collected through structured interviews with 15 respondents aged 15 to 50, supported by literature review and secondary data from government reports. The study applies the Miles and Huberman interactive model for data analysis, emphasizing data condensation, display, and conclusion drawing. Findings reveal that low educational attainment significantly contributes to the high poverty rate in the region. Individuals with limited education often face difficulties in securing stable employment, reinforcing cycles of poverty and school dropouts. Moreover, a lack of awareness about the importance of education and insufficient government intervention exacerbates the issue. Respondents expressed concerns about limited infrastructure, high education costs, and the absence of inclusive empowerment programs. The study concludes that improving educational access and awareness is critical to breaking the poverty cycle. It recommends a collaborative strategy involving government, communities, and private stakeholders to implement sustainable educational and economic interventions tailored to local needs.

Keywords: Poverty, Education, Unemployment, Kupang, Educational Access

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang masih menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia (Kusumawati & Putra, 2021). Kondisi ini ditandai oleh keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, persoalan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain tingkat pengangguran yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketimpangan akses terhadap pelayanan publik (BPS, 2024; Suparman et al., 2021). Rendahnya kualitas

pendidikan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah turut memperparah situasi tersebut, karena berdampak langsung pada keterbatasan peluang kerja dan peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang tahun 2024, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 3,96 ribu jiwa, namun angka pengangguran masih berada di angka 3,17%, dan terdapat sekitar 200 anak yang putus sekolah (BPS, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya hubungan erat antara kondisi ekonomi rumah tangga dan partisipasi pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin kerap terpaksa berhenti sekolah dan bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan keluarga, yang pada akhirnya membentuk siklus kemiskinan antargenerasi (Siregar & Santoso, 2023).

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran pendidikan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan, baik dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun dari perspektif ekonomi keluarga (Dewi & Nuryadin, 2020; Astuti & Hafid, 2021). Akan tetapi, masih minim kajian yang secara spesifik mengkaji secara mendalam bagaimana kemiskinan berdampak pada akses pendidikan di Kota Kupang dan strategi intervensi sosial yang paling relevan untuk diterapkan. Penelitian oleh Kartini & Arifin (2023) lebih banyak menyoroti tingkat kemiskinan dalam skala regional, sedangkan studi oleh Siagian & Budhi (2023) mengulas korelasi antara pengangguran, beban tanggungan, dan pendidikan secara makro.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kemiskinan terhadap akses dan kualitas pendidikan di wilayah Kota Kupang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi strategi penanganan kemiskinan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat secara kolaboratif. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah yang masih mengalami ketertinggalan secara ekonomi maupun pendidikan.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya merepresentasikan keterbatasan ekonomi, tetapi juga menyangkut hambatan struktural, sosial, dan kultural yang menghambat kemampuan individu memenuhi kebutuhan dasar (World Bank, 2020). Dalam konteks lokal, kemiskinan sering dikaitkan dengan ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak (Nugroho et al., 2021). Menurut Todaro dan Smith (2020), kemiskinan memiliki tiga karakteristik utama: rendahnya standar hidup, minimnya rasa percaya diri, dan keterbatasan kebebasan untuk mengambil keputusan hidup.

Di Indonesia, kemiskinan sering bersifat struktural karena adanya ketimpangan pembangunan antardaerah dan terbatasnya peluang ekonomi di kawasan terpencil (Wibowo & Asmara, 2022). Selain faktor eksternal seperti rendahnya investasi dan sarana infrastruktur, kemiskinan juga diperparah oleh rendahnya kapasitas individu, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan kerja (Hasan et al., 2021).

Pendidikan

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membuka akses terhadap mobilitas sosial dan kesempatan kerja (OECD, 2022). Studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dasar dan menengah secara signifikan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan, khususnya di daerah tertinggal (Yuliana & Pratiwi, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah sarana pembentukan karakter, kompetensi, dan daya saing. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan (Zulkarnaen & Rahmah, 2020). Orang dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan akses terhadap pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (Putri & Ardiansyah, 2022).

Pengangguran

Pengangguran adalah salah satu faktor dominan penyebab kemiskinan, karena hilangnya penghasilan secara langsung berdampak pada konsumsi rumah tangga dan investasi pendidikan anak (Bachtiar, 2020). Di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, keterbatasan lapangan kerja menyebabkan angka pengangguran tetap tinggi meskipun terdapat lulusan baru setiap tahun (Setiawan et al., 2021).

Pengangguran juga berpengaruh secara psikologis terhadap individu dan sosial terhadap komunitas. Hilangnya motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi masalah jangka panjang. Oleh karena itu, hubungan antara pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan menjadi sebuah siklus yang perlu diputus melalui kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan (Mulyani & Handayani, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari Maret hingga Mei 2024, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali perspektif subjektif dan konteks sosial yang memengaruhi fenomena kemiskinan secara lebih komprehensif (Creswell & Poth, 2018; Gunawan, 2020).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 15 narasumber yang dipilih secara purposive. Para informan terdiri dari orang tua siswa, guru sekolah dasar dan menengah, tokoh masyarakat, serta pemuda usia produktif (15–50 tahun) dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Wawancara dilakukan secara langsung dan didukung oleh observasi lapangan yang berfokus pada lingkungan tempat tinggal dan akses pendidikan di wilayah Kota Kupang. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen seperti laporan BPS, jurnal ilmiah, dan kebijakan pendidikan nasional. Teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode (Sugiyono, 2022).

Proses analisis data mengacu pada model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi, data yang diperoleh diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema utama seperti akses pendidikan, penyebab putus sekolah, dan persepsi masyarakat tentang kemiskinan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari informan, sedangkan penarikan kesimpulan didasarkan pada pola-pola tematik yang muncul secara konsisten selama proses pengumpulan data. Selain itu, dilakukan validasi melalui *member checking* kepada beberapa informan untuk memastikan akurasi interpretasi data (Korstjens & Moser, 2018).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara pendidikan dan kemiskinan,

tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang relevan dengan konteks lokal Kupang.

HASIL PENELITIAN

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal (Akhmad, 2021). Di Indonesia, khususnya di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, tingkat kemiskinan terus mengalami peningkatan. Faktor utama dari meningkatnya angka kemiskinan adalah tingginya jumlah pengangguran atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Di Indonesia, kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, kemiskinan alamiah, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam. Kedua, kemiskinan struktural atau buatan, yang muncul akibat adanya ketimpangan dalam struktur sosial sehingga sebagian masyarakat tidak dapat mengakses berbagai sarana dan fasilitas. Selain itu, kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, yang berperan dalam menghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Kemiskinan memengaruhi kemajuan dalam bidang pendidikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengaitkan kemiskinan dengan terbatasnya kesempatan anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan formal. Orang tua dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung memprioritaskan kebutuhan hidup harian dibandingkan pendidikan anak. Seorang informan, AG (13/06/25), menyatakan bahwa :

> *"Putus sekolah adalah awal dari kemiskinan yang tidak pernah selesai karena anak-anak kehilangan peluang untuk berkembang dan bekerja secara layak."*

Temuan ini sejalan dengan pendapat Sunusi (2020), yang menekankan bahwa akses pendidikan berkualitas sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi rumah tangga. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendidikan di beberapa wilayah di Kota Kupang menjadi faktor penghambat, terutama bagi keluarga yang tinggal di wilayah pinggiran.

Kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam kemiskinan dan kesulitan mengakses pendidikan.

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang sulit diberantas secara tuntas di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu tantangan utamanya adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan pekerjaan (Rahmawati & Nuryadi, 2020). Wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal masih menghadapi permasalahan serius berupa rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka pengangguran, yang memperparah kondisi kemiskinan masyarakat (Wibowo & Asmara, 2022).

Pendidikan menjadi indikator penting dalam membuka akses terhadap pasar tenaga kerja formal. Tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan stabil. Individu dengan pendidikan rendah kerap kali terkendala oleh keterbatasan kompetensi, sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja yang semakin selektif (Putri & Ardiansyah, 2022). Sebaliknya, pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan peningkatan produktivitas, kepercayaan diri, dan pendapatan yang pada akhirnya dapat memperbaiki kondisi ekonomi keluarga (Hasan et al., 2021).

Namun demikian, kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh faktor internal seperti pola pikir dan budaya pasrah. Rendahnya motivasi untuk keluar dari jerat kemiskinan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan

menjadi hambatan tersendiri dalam pembangunan manusia (Yuliana & Pratiwi, 2021). Banyak keluarga berpenghasilan rendah merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan, dan akhirnya menyerah pada kondisi tanpa upaya perubahan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pengembangan diri dan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Perubahan pola pikir menuju orientasi masa depan, serta keberanian memanfaatkan peluang pendidikan dan pelatihan kerja, dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan taraf hidup. Upaya ini tentu harus didukung oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran (Astuti & Hafid, 2021).

Strategi penanganan yang bertujuan menekan dampak negatif kemiskinan terhadap dunia pendidikan.

Kemiskinan merupakan isu sosial yang kompleks dan mendesak untuk segera ditangani, terutama di wilayah-wilayah dengan ketimpangan ekonomi tinggi seperti Kota Kupang. Hasil kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti minimnya lapangan pekerjaan, tetapi juga oleh faktor internal seperti rendahnya motivasi individu dan kurangnya literasi pendidikan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta (Zulkarnaen & Rahmah, 2020).

Strategi pertama adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya pekerjaan dan kemandirian ekonomi. Pemerintah perlu merancang program pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kerja yang menyasar kelompok berpendidikan rendah dan berpenghasilan minim (Yuliana & Pratiwi, 2021). Program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Strategi kedua adalah memperkuat edukasi publik mengenai nilai strategis pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, pendampingan keluarga miskin, serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Pendidikan bukan hanya alat akademik, melainkan juga sarana pembentukan karakter dan pola pikir produktif (Putri & Ardiansyah, 2022). Hal ini penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Strategi ketiga adalah peningkatan efektivitas program pemerintah yang bersifat inklusif. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja yang tidak mensyaratkan pendidikan formal tinggi, serta memberikan dukungan finansial seperti subsidi usaha mikro dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (Astuti & Hafid, 2021). Program bantuan pendidikan seperti sekolah gratis dan beasiswa prestasi telah terbukti mampu menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan (Hasan et al., 2021).

Sinergi antara semua pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi ini. Kebijakan yang dirancang harus berbasis data dan kebutuhan lokal, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat agar tidak hanya bersifat top-down tetapi juga membumi dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam memutus rantai kemiskinan di Kota Kupang. Rendahnya tingkat pendidikan mempersempit akses terhadap pekerjaan yang layak, memperkuat ketidaksetaraan sosial, dan mempertahankan kemiskinan lintas generasi. Selain itu, rendahnya kesadaran

masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan lemahnya pelaksanaan program pemerintah menjadi faktor penghambat utama dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.

Solusi terhadap persoalan ini tidak cukup hanya berupa intervensi ekonomi, tetapi juga harus mencakup aspek edukatif dan partisipatif. Diperlukan kebijakan yang menyeluruh, seperti pemberian beasiswa, pendidikan yang terjangkau dan merata, pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, serta pembangunan fasilitas pendidikan yang memadai. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi elemen penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis komunitas, pendidikan dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam strategi jangka panjang pengurangan kemiskinan, khususnya di daerah tertinggal dan rentan seperti Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, K. A. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(06), 173–181.

Astuti, Y., & Hafid, H. (2021). The role of education in poverty reduction: A systematic literature review. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, 8*(1), 33–42.

Bachtiar, F. (2020). Structural unemployment and education mismatch in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 44–59.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Kupang City in figures 2024*. BPS Kota Kupang.

Dewi, F. R., & Nuryadin, M. (2020). Education and poverty: The evidence from Indonesian households. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 21*(2), 99–108.

Hasan, R., Pramana, R. A., & Wulandari, S. (2021). Poverty dynamics and education access in rural Indonesia. Journal of Southeast Asian Studies, 56(3), 215–232.

Kartini, R., & Arifin, Z. (2023). Analisis tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015–2021. *Jurnal Regional dan Sosial Ekonomi*, *12*(3), 45–58.

Kusumawati, S., & Putra, R. E. (2021). Multidimensional poverty and its determinants in Indonesia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *20*(1), 14–26.

Mulyani, E., & Handayani, L. (2019). Pendidikan dan pengangguran: Tantangan pembangunan manusia Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 10(2), 123–138.

Nugroho, H., Riyadi, S., & Mahendra, G. (2021). Understanding multidimensional poverty in Indonesia. Social Indicators Research, 156(4), 987–1005.

OECD. (2022). Education at a glance 2022: OECD indicators. OECD Publishing.

Putri, R. M., & Ardiansyah, D. (2022). Education level and income inequality in Indonesia: An empirical study. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 23(1), 77–88.

Rahmawati, N., & Nuryadi, M. (2020). Geographical inequality and education access in Eastern Indonesia. Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 8(2), 89–102.

Setiawan, H., Marbun, D. S., & Lestari, F. (2021). Employment challenges among educated youth in Eastern Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 3(4), 190–201.

Siagian, F. E., & Budhi, M. K. S. (2023). Pengaruh beban tanggungan, pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan di NTT. *Jurnal Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*, *11*(2), 122–134.

Siregar, D., & Santoso, H. (2023). Intergenerational poverty and educational access in Eastern Indonesia. *Indonesian Journal of Social Development, 3*(2), 76–87.

Suparman, R., Handayani, S., & Oktaviani, A. (2021). Urban poverty and social exclusion in Eastern Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional dan Urban, 9*(4), 199–210.

Wibowo, A., & Asmara, H. (2022). Regional inequality and poverty in Indonesia: A panel data analysis. Economic Journal of Emerging Markets, 14(1), 13–25.

World Bank. (2020). Indonesia economic prospects: The long road to recovery. https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/iep-december-2020

Yuliana, D., & Pratiwi, R. (2021). Role of education in reducing poverty: Evidence from Indonesian provinces. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(2), 102–110.

Zulkarnaen, N., & Rahmah, R. (2020). Education, employment, and poverty reduction: A theoretical and empirical review. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pendidikan, 13(1), 65–76.